

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidakteraturan regulasi atas bantuan sosial menjadi faktor penting yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan dana bantuan sosial tidak dapat dikontrol dengan baik dan dapat menyebabkan kecurangan atas dana bantuan sosial, seperti korupsi. Menurut Lesmana (2010) ada tidaknya pengungkapan atas rincian belanja bantuan sosial yang disajikan oleh pemerintah daerah diduga juga dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing pemerintah daerah.

Semakin besar kapasitas fiskal akan meningkatkan kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada dari suatu daerah. Penelitian yang dilakukan Yon (2010) kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Semakin besar jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat memberikan tekanan yang lebih besar pada Pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap (*full disclosure*), termasuk pengungkapan atas belanja bantuan sosial. Penelitian yang dilakukan Darmastuti dan Setyaningrum menunjukkan adanya pengaruh *legislative size* terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009.

Damanpour dalam Darmastuti dan Setyaningrum (2011) berpendapat diferensiasi fungsional memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan inovasi. Semakin banyak jumlah entitas akuntansi pada suatu pemerintah daerah, akan semakin besar pemenuhan pengungkapan termasuk pengungkapan atas belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menemukan bahwa pemerintah daerah di Pennsylvania dengan tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) Nomor 34* dibandingkan dengan yang tingkat diferensiasi fungsionalnya rendah.

Patrick (2007) menemukan bahwa pemerintah daerah yang memiliki administrator yang memiliki spesialisasi pekerjaan yang ditunjukkan dengan keterampilan dan pelatihan yang tinggi khususnya di bidang pelaporan keuangan/akuntansi akan lebih besar keinginannya untuk mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) Nomor 34* dibandingkan dengan Pemerintah daerah yang administratornya memiliki keterampilan dan pelatihan yang rendah.

Penelitian yang dilakukan Hilmi dan Martani (2011) menunjukkan kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka kinerja keuangan diharapkan akan semakin bagus. Salah satu perwujudan akuntabilitas adalah pelaporan kinerja organisasi melalui laporan keuangan (Mahmudi dalam Sumarjo, 2010).

Penelitian Lesmana (2010) membuktikan bahwa semakin lama suatu pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya, semakin besar tingkat pengungkapan yang disajikan oleh pemerintah daerah tersebut. Semakin lama suatu pemerintah daerah terbentuk, maka pemerintah daerah tersebut semakin berpengalaman dan pengalaman tersebut menjadi keunggulan dari pemerintah dalam menjalankan sistem administrasinya termasuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Semakin tinggi tingkat ketergantungan maka akan terjadi penekanan pada pemerintah daerah atas DAU yang pemerintah daerah gunakan sehingga perlu dilakukannya pengungkapan informasi yang lebih banyak dan terinci. Penelitian Lesmana (2010) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Patrick (2007) yang menguji hubungan variabel pembiayaan utang dengan determinasi dalam mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) Nomor 34 menemukan adanya pengaruh pembiayaan utang terhadap inovasi. Hal ini disebabkan karena organisasi dengan level pembiayaan utang yang tinggi akan diminta untuk menerbitkan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum.

Suhardjanto (2010) dalam Sumarjo (2010) menemukan adanya pengaruh positif intergovernmental revenue terhadap kesesuaian pengungkapan wajib pemerintah daerah. Dalam hal pembelanjaan dana perimbangan, pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Meskipun pemerintah pusat sebagai penyedia dana perimbangan tidak secara langsung membutuhkan pelaporan keuangan dari pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat akan meminta suatu bentuk akuntabilitas dari pemerintah daerah (Patrick, 2007). Pemerintah daerah dapat melaksanakan akuntabilitasnya dengan melakukan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lengkap, termasuk pengungkapan rincian atas belanja bantuan sosial.

Semakin banyak jumlah penduduk di suatu pemerintah daerah berarti semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Masyarakat akan melakukan penekanan akan dana yang mereka keluarkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan maupun non keuangan. Hasil yang dilakukan Hilmi dan Martani (2011) menemukan adanya pengaruh positif jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Bertolak dari latar belakang dan beberapa penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh kapasitas fiskal, *legislative size*, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, ukuran pemerintah, daerah, umur pemerintah daerah, rasio kemandirian, pemerintah daerah, pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmastuti dan Setyaningrum (2011). Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu pada periode sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya 2009, sedangkan penelitian ini

menggunakan periode 2012. Adapun keunggulan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti memperbanyak jumlah variabel bebas dengan menambahkan variabel jumlah penduduk. Berdasarkan teori, jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah, semakin kompleks pemerintah maka semakin besar pengungkapan yang harus mereka lakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah:

1. Apakah kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah *legislative size* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah diferensiasi fungsional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?

6. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?
7. Apakah rasio kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?
8. Apakah pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?
9. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?
10. Apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji apakah *legislative size* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk menguji apakah diferensiasi fungsional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji apakah spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji apakah umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Untuk menguji apakah rasio kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Untuk menguji apakah pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.
9. Untuk menguji apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.
10. Untuk menguji apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.